

KRITIK TERHADAP SISTEM EKONOMI SOSIALIS DAN KAPITALIS

M. Sholahuddin

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The failure of economic capitalism system stated by Adam Smith (1723-1790) and David Ricardo (1772-1823) actually have been criticized by Karl Marx (1818-1883) in his book "A Contribution to the Critique of Political Economy" (1857) and "A Contribution to the Critique of Political Economy" (1859). Karl Marx and Engels compile a new synthesis of economic socialist system. Stranger enough, socialism particularly as economic ideology is destroyed earlier than Capitalism. Meanwhile, capitalism still survives by transforming performance. For examples, at the time of the glory of Socialism age, capitalism was transformed into socialism state with social justice and welfare state concepts, and when Islam began to rise, it was transformed into new performance as if it has characteristic of Islam, but in fact it is still capitalism. This writing tries to criticize both of them by Islamic economic perspective.

Keywords: *Socialisme, kapitalisme, welfare state, economic system, value concept*

SOSIALISME DAN KOMUNISME

Menurut bahasa, Sosialisme berasal dari *social* (kemasyarakatan), sedangkan menurut istilah merupakan paham atau ajaran kenegaraan yang berusaha supaya harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik negara.¹ Michael Upshall mengkategorikan *Socialisme* sebagai ideologi politik. Menurut dia, Sosialisme digunakan sebagai nama gerakan yang memperjuangkan kembalinya kelas masyarakat tertentu,

¹ Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976, h. 961

berkaitan dengan kepemilikan umum yang dikuasai oleh kaum Kapitalis. Sosialisme identik dengan Komunisme dan Anarkisme.²

Sosialisme sebagai ideologi politik semestinya tidak bertolak belakang dengan fakta, seperti Kapitalisme, sekalipun keduanya sama-sama berangkat dari masalah ekonomi, dan menjadikan pembahasan ekonomi sebagai kajian yang paling menonjol di dalamnya. Akan tetapi kurang mencukupi jika memahami Sosialisme hanya dalam wacana ekonomi, karena Sosialisme merupakan sebuah ideologi.

Sosialisme adalah ideologi berasaskan Materialisme, yang mengesampingkan adanya Pencipta alam, dan sebaliknya menganggap asal usul kejadian alam berasal dari benda. Dengan asas ini, hukum dan sistemnya dibangun berdasarkan akal semata-mata, sedangkan standard perbuatannya berdasarkan Dialektika Materialisme, dengan formula *thesis-anti thesis-sinthesis*. Sehingga Sosialisme memandang bahwa kebahagiaan manusia diukur secara material, yaitu ketika keperluan jasmaninya terpenuhi. Untuk mewujudkan konsep tadi, Sosialisme menggunakan metode kontradiksi. Dengan konsep tersebut, individu dalam masyarakat dianggap sebagai bagian dari materi yang akan berubah mengikuti perubahan benda (materi) secara umum, dan karena faktor yang menentukan perubahan adalah faktor ekonomi, maka alat-alat distribusilah yang menentukan hukum dan sistem kehidupan dalam masyarakat. Ringkasan dari ideologi Sosialisme dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Ideologi Sosialisme

Aspek Kehidupan	Ideologi Sosialisme
<ul style="list-style-type: none"> • Asas • Sumber Hukum dan Sistem • Bagaimana Hukum dan Sistem Dilahirkan? • Standard Perbuatan • Pandangan tentang Kebahagiaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Materialisme • Akal Manusia • Dari Alat-alat produksi • Dialektika Materialisme • Hedonisme (kepuasan material semata)

² Michael Upshall, *The Hutchinson Pocket Encyclopedia*, Hutchinson, London, cet. II, 1989, h. 116-117.

Lanjutan tabel 1...

Aspek Kehidupan	Ideologi Sosialisme
<ul style="list-style-type: none">• Metode Mewujudkan Manfaat dan Kebahagiaan• Kehidupan Individu dalam Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kontradiksi• Individu Mengalami Perubahan mengikuti perubahan benda

Inilah gambaran secara umum tentang Sosialisme sebagai ideologi.³

SISTEM EKONOMI SOSIALIS

Sosialisme sebagai sistem ekonomi sebenarnya merupakan *anti-thesis* Kapitalisme. Sesuai dengan namanya, sistem ekonomi Sosialis adalah sistem pengaturan ekonomi yang berkaitan dengan harta benda, industri dan perusahaan secara kolektif yang dikuasai oleh negara.⁴ Secara umum, sistem tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:

Pertama, mewujudkan kesetaraan (*equality*).

Kedua, menghapuskan kepemilikan individu (*private ownership*).

Ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.

1. Mewujudkan Kesetaraan (*Equality*)

Bentuk kesetaraan (*equality*) yang ingin diwujudkan sampai saat ini masih diperselisihkan oleh kaum Sosialis. Ada yang menyebutnya dengan *Kesetaraan Aritmetik*, yaitu kesetaraan dalam segala hal yang bisa dimanfaatkan, di mana setiap individu diberikan sesuatu yang sama dengan individu yang lain. Kelompok lain menyebutnya dengan *Kesetaraan Sosial*, yaitu pembagian hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan keperluan masing-masing, dan pembagian kerja sesuai dengan

³ Pada abad ke-19 M, Sosialisme berkaitan erat dengan reformasi sosial tertentu, yang dinamakan Sosialisme Kristen dan Sosialisme Utopia. Di antara mereka ada yang mendirikan koloni-koloni di Amerika berdasarkan Komunisme dengan berbagai bentuk. Karl Marx yang menjadi pencetus Sosialisme Modern menamakan programnya dengan istilah Komunisme, yang kemudian diubah menjadi Sosialisme. Akhirnya Sosialisme sama dengan Komunisme. Lihat, Winardi, *Kamus Ekonomi: Inggris-Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, cet. XII, 1992., h. 443.

⁴ Poerwadarminta, *op.cit*, h. 961

kemampuan. Kesetaraan ini dapat diwujudkan bila konsep ini diterapkan: *Masing-masing (akan diberikan pekerjaan) sesuai dengan kemampuannya, dan masing-masing mendapatkan sesuatu sesuai dengan keperluannya.* Ada yang menyatakan, bahwa kesetaraan tersebut tentunya dilihat sesuai dengan alat-alat distribusi dengan konsep: *Masing-masing sesuai dengan kemampuannya atau kesanggupannya, dan masing-masing sesuai dengan aktivitasnya.* Kesetaraan tersebut benar-benar akan terwujud kalau setiap orang dibekali dengan alat-alat distribusi yang sama dengan orang lain.

2. Menghapuskan Kepemilikan Individu

Dalam konteks penghapusan kepemilikan individu (*private ownership*) juga terdiri dari beberapa mazhab. Mazhab Komunisme berpendapat bahwa kepemilikan individu harus dihilangkan sama sekali. Mazhab Sosialisme Kapital berpendapat, bahwa kepemilikan individu yang berkaitan dengan barang-barang modal atau alat-alat distribusi, itulah yang dihapus, seperti tanah, industri, rel kereta api, jalan raya, tambang dan sebagainya. Ada yang menghilangkan kepemilikan yang berkaitan dengan tanah pertanian saja. Mazhab ini disebut Sosialisme Pertanian. Ada juga yang mengatakan: *"Hendaklah dikaji setiap situasi bila ada kemaslahatan umum yang mengupayakan perubahan status milik pribadi menjadi milik umum, termasuk menentukan aktivitas para pemilik dalam berbagai situasi, agar para penguasa membuat kebijakan yang tertinggi dalam hal sewa dan ketentuan terendah untuk upah sementara para pekerja dibebaskan mendapatkan modal dan sebagainya."* Ini biasanya disebut mazhab Sosialisme Negara.

3. Mengatur Produksi dan Distribusi Secara Kolektif

Pengaturan tentang produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi Sosialis terdiri dari beberapa pendapat. Mazhab *Guild Socialism* menyatakan, bahwa pengaturan tentang produksi dan distribusi diwujudkan dengan bekerja, yaitu tenaga kaum buruh itu sendiri, yang antara lain dilakukan dengan merusak alat-alat produksi, menyebarkan ide vandalis kepada kaum buruh, serta upaya merealisasikannya. Sosialisme Marxisme menyebut proses tersebut sebagai hukum perubahan dalam masyarakat, atau yang disebut dengan metode Kontradiksi. Adapun Sosialisme Negara menyatakan perlunya kajian terhadap semua keadaan yang memungkinkan

terjadinya perubahan kepemilikan individu (*private ownership*) menjadi milik umum (*public ownership*), yang biasanya dikenali dengan istilah *Nationalization*.⁵

KRITIK TERHADAP SISTEM EKONOMI SOSIALIS

Kritik terhadap sistem ekonomi Sosialis dapat dilihat berdasarkan konsep dan asas yang membangun sistem ekonominya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, konsep Materialisme.

Kedua, asas yang membangun sistem ekonomi Sosialis.

1. Kritik terhadap Konsep Materialisme

Materialisme adalah faham yang berpendapat bahwa melainkan benda jua yang menjadi sebab segala yang ada dan terjadi di dunia ini,⁶ di mana materi bersifat azali. Faham ini juga mengesampingkan agama, dan menganggap agama sebagai candu.

Dari segi konsep berfikir di atas, nampak bahwa Materialisme tidak sesuai dengan logika, tetapi materi. Hal ini karena materi dianggap sebagai ujung asal segalanya, termasuk pemikiran. Adanya materi lebih dahulu dibandingkan akal atau pikiran. Di satu segi, Materialisme juga berlawanan dengan fitrah manusia yang memiliki naluri beragama.

Akibat dari paham semacam ini, maka kehidupan manusia dipisahkan dengan Tuhannya secara mutlak, yang menyebabkan manusia hidup tanpa aspek kerohanian. Inilah yang menjadi ciri khas sistem Sosialisme, begitu pula aspek ekonominya, politiknya, maupun yang lainnya.

2. Kritik terhadap Asas yang Membangun Sistem Ekonomi Sosialis

a. Kritik terhadap Ide Kesetaraan (Equality)

Dari segi kesetaraan (*equality*) yang hendak diwujudkan dalam Sosialisme adalah kesetaraan barang dan jasa atau kesetaraan total.

⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Siyasah al-Iqtisadiyyah al-Muthla*, t.p. h. 23.

⁶ Poerwadarminta, *op.cit*, h. 638.

Ide ini jelas mustahil diwujudkan, karena konsep ini merupakan khayalan atau hipotesis yang mengada-ada. Karena kesetaraan, dari segi bahwa antara A dan B mesti sama itu tidak mungkin terjadi, sehingga kesetaraan ini benar-benar tidak akan mungkin terjadi. Sebab, menurut fitrah manusia memang berbeda kekuatan jasmani dan intelektual serta keperluannya. Oleh karena itu, perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh manusia, serta perbedaan dalam memperoleh jasa dan alat-alat produksi adalah masalah yang pasti terjadi. Sehingga setiap usaha untuk menyamaratakan pasti akan gagal, karena hal itu bertentangan dengan fitrah ketidaksamaan yang ada pada manusia.

b. Kritik terhadap Ide Menghapuskan Kepemilikan Individu

Mengenai penghapusan kepemilikan individu (*private ownership*) secara mutlak juga bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini karena kepemilikan merupakan salah satu aspek dari naluri untuk mempertahankan diri (*survival instinct*) manusia, sehingga senantiasa ada dalam diri manusia.

Adalah mustahil bila kepemilikan individu tersebut dihapus, karena ia berkaitan erat dengan naluri manusia yang tidak mungkin dapat dicabut dalam diri manusia. Setiap usaha untuk menghapuskannya justru sebenarnya merupakan tindakan yang merusakkan manusia, yang hanya akan menyebabkan kegoncangan dan kemusnahan. Oleh karena itu, mesti dilakukan adalah mencari jalan untuk mengatur naluri tersebut, dan bukan menghapuskannya.

c. Kritik terhadap konsep Pengaturan Produksi dan Distribusi Secara Kolektif

Dalam masalah pengaturan produksi dan distribusinya secara kolektif, sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan cara menciptakan kekacauan dan huru-hara di tengah masyarakat, atau dengan menciptakan dendam maupun permusuhan antar sesama mereka. Karena cara seperti ini bukan cara untuk mengatur sistem produksi atau distribusi secara kolektif.

Adapun untuk mengatur produksi dan distribusinya, perlu dilakukan dengan menggunakan undang-undang dan penyelesaian masalah yang benar, dengan asas yang benar, serta sesuai dengan fakta permasalahannya. Sebaliknya dalam hal ini, Sosialisme kadangkala bersandar pada gejolak dan goncangan yang diciptakan

di kalangan kaum buruh, dan kadangkala bersandar kepada perubahan secara materi, juga kadangkala peraturan dan undang-undang yang digunakan dibuat tetapi tidak dilandaskan pada landasan yang kokoh. Dengan demikian, model pengaturan seperti ini jelas salah mulai dari akarnya.

Inilah penjelasan tentang kesalahan Sosialisme secara umum, sedangkan mengenai kekeliruan Sosialisme Marxisme secara umum dapat dikembalikan kepada kekeliruan karena menjadikan hipotesis atau khayalan sebagai asas berfikir, sehingga secara teori ia banyak bertolak belakang dengan fakta yang ada.

KRITIK TERHADAP SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada sistem dan ideologi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan pasar, yang dikendalikan oleh produksi, distribusi dan konsumsi.⁷

Kritik yang akan disampaikan menyangkut pandangan tentang dasar-dasar sistem ekonomi kapitalis antara lain mencakup (1) konsep kelangkaan (2) konsep nilai (value) suatu barang dan jasa serta (3) konsep harga dan perannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi.⁸

1. Kritik Terhadap Kelangkaan sebagai Problematika Ekonomi.

Pandangan sistem kapitalis yang menyamakan antara pengertian kebutuhan (*need*) dengan keinginan (*want*) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta.

Keinginan (*want*) manusia memang tidak terbatas dan cenderung untuk terus bertambah dari waktu ke waktu. Sementara kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan pokok dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap, yaitu kebutuhan sekunder dan tersier.

Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya bersifat terbatas. Setiap orang yang telah kenyang makan makanan tertentu maka pada saat itu sebenarnya dia tidak membutuhkan lainnya. Demikian juga dengan kebutuhan sandang dan

⁷ Alan Isaacs, *Oxford Paperback Encyclopedia*, Oxford University Press, New York, 1998, h. 251.

⁸ Reza Rosadi, *Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis*, h.7.

papan. Dan jika manusia sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka sebenarnya dia sudah dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

Adapun kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap (sekunder dan tersier), memang pada kenyataannya selalu berkembang terus bertambah seiring dengan tingkat kesejahteraan individunya. Namun perlu ditekankan di sini bahwa jika seorang individu atau suatu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pelengkapya, namun kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka individu atau masyarakat tersebut tetap dapat menjalani kehidupannya tanpa kesulitan berarti.

Sedangkan keinginan manusia memang tidak terbatas. Sebagai contoh seseorang yang sudah makan kenyang, kebutuhan akan makanan sudah terpenuhi tentunya ia dapat saja menginginkan makanan lainnya sebagai variasi dari makanannya. Oleh karena itu sebenarnya kebutuhan pokok manusia sifatnya terbatas adapun keinginan manusia memang tidak pernah akan habis selama ia masih hidup. Sehingga pandangan kapitalis yang menyamakan antara kebutuhan dan keinginan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Kekeliruan lainnya adalah pandangan para ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa kebutuhan terbatas pada kebutuhan materi saja. Pandangan ini salah dan sangat bertentangan dengan fakta.

Selain mempunyai kebutuhan materi, manusia mempunyai kebutuhan non materi. Dalam hal ini ternyata para ekonom kapitalis tidak mengenal kebutuhan-kebutuhan itu sehingga mereka dipenuhi oleh kekeringan nilai agama, moral, dan nilai kemanusiaan.

Demikian pula pandangan ahli ekonomi kapitalis yang memandang bahwa kebutuhan dan manfaat suatu materi sebagaimana adanya, tanpa memperhatikan apakah itu dapat mensejahterakan masyarakat, adalah tidak tepat. Sebab menentukan suatu kebutuhan berdasarkan keinginan manusia semata sangatlah tidak tepat.

Masyarakat kapitalis harus menerima kebutuhan sebagian dari mereka terhadap narkoba, obat-obat terlarang, perjudian, pelacuran. Karena faktanya ada di antara mereka yang menginginkannya, meskipun berbahaya. Konsep yang demikian tentulah akan menghancurkan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan yang aneh itu akan

meruntuhkan tatanan masyarakat mereka sekalipun konsumen kebutuhan tadi hanya segelintir orang.

Kekeliruan lain yang dapat kita paparkan adalah ketika para ahli ekonomi kapitalis menganggap bahwa barang dan jasa yang diproduksi hanya semata-mata untuk dimanfaatkan menjadi alat tukar-menukar sesama manusia. Padahal sebenarnya ketika barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dijadikan sebagai alat untuk tukar-menukar, maka pada saat itulah barang dan jasa tersebut sangat menentukan bentuk dan corak interaksi antar anggota masyarakat. Oleh karena itu agar interaksi di antara anggota masyarakat dapat berjalan secara aman, mendatangkan ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan, maka harus ada perhatian terhadap sesuatu yang harus dijadikan pijakan oleh masyarakat. Dengan kata lain harus ada kesepakatan bersama tentang mana yang pada hakikatnya bermanfaat bagi masyarakat serta mana yang pada hakikatnya membahayakan masyarakat.

Kita semestinya tidak boleh mengklaim bahwa barang dan jasa tertentu bermanfaat hanya karena sekelompok orang menginginkannya tanpa melihat esensi apakah barang dan jasa tersebut berbahaya atau tidak. Berdasarkan hal ini, maka narkoba, prostitusi dan sejenisnya tidak boleh dianggap sebagai barang dan jasa yang bermanfaat, atau menganggapnya sebagai barang dan jasa yang produktif, semata karena ada orang yang menginginkannya. Ketika melihat manfaat barang dan jasa, kita harus melihat pengaruh barang dan jasa produktif tersebut terhadap hubungan masyarakat. Inilah penjelasan tentang kekeliruan ekonom kapitalis dalam memandang kebutuhan manusia yang dianggapnya tidak terbatas.

Adapun kekeliruan lain yang dilakukan para ekonom kapitalis adalah ketika mereka memandang bahwa problematika ekonomi terjadi karena adanya kelangkaan (*scarcity*). Bahwa akibat terbatasnya barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas, telah menyebabkan pandangan para ekonom kapitalis tersebut dibangun dengan berpijak pada distribusi kekayaan dengan porsi yang jauh lebih besar daripada distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab menurut mereka masalah kelangkaan hanya dapat diselesaikan dengan jalan produksi setinggi-setingginya. Bahkan pandangan terhadap masalah distribusi tersebut menjadi sebuah pandangan yang tidak utuh. Atas dasar inilah, maka sistem

ekonomi kapitalis hanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara total. Kemudian berusaha memperoleh tingkat produksi setinggi-tingginya. Dan terealisasinya kemakmuran anggota masyarakat setinggi mungkin sebagai akibat adanya penambahan pendapatan nasional (*national income*), dan naiknya produksi suatu negara. Menurut mereka hal ini tentu saja hanya akan dapat direalisasikan jika membebaskan masyarakat bekerja sebebas-bebasnya untuk berproduksi sesuai dengan faktor-faktor produksinya masing-masing dan mengumpulkan kekayaan tersebut.

Pandangan inilah yang mereka sebut dengan Politik Ekonomi (*Political Economy*) atau Ekonomi Kapitalis. Pandangan ini jelas keliru dan bertentangan dengan realitas, serta tidak pernah menyebabkan naiknya taraf kehidupan individu secara menyeluruh. Begitu pula, tidak pernah menghasilkan kemakmuran bagi setiap individu masyarakat. Fakta ini terlihat bahwa negara-negara Barat yang telah termasuk ke dalam negara-negara kaya sekalipun masih banyak dijumpai orang-orang miskin dengan perkampungan kumuhnya dan para pengemis serta gelandangan yang selalu terlihat di sudut-sudut kota.

Kesalahan pandangan mereka tersebut terletak pada kesalahan mereka dalam memandang kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan masing-masing individu khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok mereka. Bukan kebutuhan-kebutuhan segenap manusia, umat ataupun bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu problematika ekonomi itu akan muncul di tengah masyarakat jika ada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Bukan karena seluruh kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Sebab selama kebutuhan pokok setiap individu masyarakat terpenuhi meskipun kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) belum atau bahkan tidak terpenuhi, maka masyarakat tersebut tidaklah mengalami kesulitan yang berarti dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya meskipun suatu negara telah tergolong sebagai negara kaya, namun masih ada individu masyarakatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka sebenarnya problematika ekonomi tetap akan selalu dihadapi oleh negara tersebut.

Dengan demikian masalah ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat kepada setiap individu, yaitu pendistribusian barang dan jasa kepada individu masyarakat, bukan bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan yang dituntut oleh umat atau bangsa secara total, tanpa melihat masing-masing individunya

Oleh karena itu pondasi ekonomi yang harus dibuat adalah kebijakan yang dapat menjamin distribusi kekayaan negara baik kekayaan di dalam maupun di luar negeri kepada seluruh anggota masyarakat, baik dari segi terjaminnya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok semua anggota masyarakat dan memuaskan mereka. Di samping adanya jaminan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka.

Adapun pembahasan yang menyangkut faktor-faktor yang bisa mempengaruhi laju produksi dan pendapatan nasional, maka hal tersebut disinggung dalam pembahasan "Ilmu Ekonomi". Artinya pembahasannya menyangkut barang dan jasa ekonomis (*economic goods*) dan penambahan kualitasnya, dan bukan pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusai yang diatur oleh "Sistem Ekonomi"

2. Kritik Tentang Konsep Nilai (Value)

Pandangan para ahli ekonomi Kapitalis yang menyatakan bahwa nilai guna (*value in use*) suatu barang dan jasa sangat tergantung dengan masing-masing individu dan bersifat sangat subyektif, telah membawa konsekuensi bahwa sistem ekonomi kapitalis menganggap nilai barang dan jasa sebagai sesuatu yang nisbi (*relatif*), bukan hakiki.⁹ Sebab menurut mereka penilaian terhadap barang dan jasa sangat ditentukan oleh pandangan setiap orang terhadap tingkat kepuasan yang dapat dia rasakan ketika dia mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Dan tingkat kepuasan yang dapat dia rasakan tersebut sangat tergantung dengan harga barang dan jasa tersebut.

Pandangan yang demikian adalah pandangan yang keliru. Sebab nilai suatu barang dan jasa sebenarnya semata-mata ditentukan oleh manfaat (kegunaan)-nya, dengan memperhatikan faktor kelangkaannya.

⁹ Karl Marx, *Naqd al-Istisad as-Siyasi*, Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, cet. I, 1969, h. 13.

Sehingga pandangan yang *hakiki* terhadap nilai barang dan jasa apapun, adalah pandangan terhadap manfaat barang dan jasa tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Oleh karena itu, nilai hakikatnya adalah sesuatu yang pasti (*hakiki*) dan bukan sesuatu yang relatif (*nisbi*). Jadi nilai itu adalah sesuatu yang memiliki fakta yang dapat dijangkau, bukan merupakan sesuatu yang *nisbi* (relatif).¹⁰ Karena itu pandangan para ahli ekonomi kapitalis terhadap nilai adalah pandangan yang salah dari dasarnya.

Sedangkan apa yang mereka sebut dengan teori kepuasan marjinal (*marginal utility theory*), sebenarnya pembahasannya tidak berkaitan dengan konsep “nilai” barang dan jasa tetapi berkaitan dengan konsep “harga”. Karena “nilai” barang dan jasa sebenarnya ditentukan oleh perkiraan manfaat barang tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaannya pada saat tertentu. Karena itu naiknya harga suatu barang tidaklah berarti bahwa “nilai” meningkat dan sebaliknya turunnya harga barang tidak berarti “nilainya” juga menurun. Sebab nilai suatu barang dari segi manfaatnya tidak berpengaruh dengan harganya.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara harga dengan nilai, termasuk menurut para ahli ekonomi kapitalis sekalipun. Di mana harga perkiraannya ditentukan oleh adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Sedangkan nilai perkiraannya ditentukan oleh manfaat yang terdapat pada barang dan jasa ketika diukur manfaatnya dengan memperhatikan faktor kelangkaannya. Dengan demikian pembahasan tentang nilai dilihat dari segi dasarnya adalah keliru. Sehingga pembahasan yang dibangun dengan dasar yang salah tersebut keliru pula.

Namun apabila nilai tersebut manfaatnya diperkirakan dengan kegunaan barang dan jasa tertentu, maka hal itu merupakan perkiraan yang tepat. Dimana perkiraan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih tepat meskipun dalam jangka pendek. Sedangkan apabila nilai tersebut kegunaannya diukur atau diperkirakan dengan harga, maka hal itu merupakan perkiraan yang bersifat dugaan, bukan hakiki lagi. Pada saat itu nilai akan berubah-ubah setiap saat mengikuti kecenderungan pasar. Dan pada saat itu keberadaannya sebagai nilai

¹⁰ Mahmud al-Khalidi, *Hukm al-Islam fi ar-Ra'sumaliyyah*, Maktabah ar-Risalah al-Hadiithah, Amman, Jordan, cet. I, 1986., h. 98.

akan gugur, sehingga realitas nilai tersebut tidak layak lagi disebut dengan "nilai" (*value*), melainkan telah berubah menjadi alat yang di dalamnya terdapat nilai uang yang mengikuti kecenderungan pasar, bukan mengikuti manfaat yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu ketika harga ditetapkan sebagai satu-satunya "nilai tukar", maka secara pasti harga tersebut merupakan standar (tolok ukur) bagi barang dan jasa apakah barang dan jasa tersebut berguna (*utility*) atau tidak (*disutility*).¹¹ Bahkan harga tersebut merupakan standar (tolok ukur) bagi tingkat kegunaan suatu barang apakah tinggi atau rendah. Oleh karena itu suatu barang dan jasa dinilai memiliki kegunaan dan produktivitas tertentu, ketika masyarakat menentukan barang dan jasa tertentu itu mempunyai harga tertentu. Adapun tingkat kegunaannya, diukur dengan tingkat harga yang diterima oleh konsumen dari produsen pada saat terjadi transaksi jual beli. Sehingga barang dan jasa yang memiliki tingkat kegunaan yang lebih besar akan dinilai dengan harga yang lebih besar pula. Baik barang dan jasa tersebut merupakan barang pertanian ataupun industri, jasa layanan pedagang, layanan jasa biro angkutan, dokter, insinyur dan lain-lain.

Selain itu menjadikan harga sebagai satu-satunya nilai tukar barang dan jasa adalah keliru. Karena itu sesungguhnya ada perbedaan antara "nilai tukar" dengan harga. Di mana "nilai tukar" (*value in exchange*) adalah penisbatan pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lainnya secara mutlak. Sedangkan "harga" adalah "nilai tukar" barang dan jasa dengan uang. Sehingga harga sebenarnya tidak secara pasti menggambarkan nilai tukar barang dan jasa yang sebenarnya.

Hal ini membawa konsekuensi, bahwa seluruh harga barang dan jasa bisa jadi akan meningkat tinggi pada saat yang bersamaan (mengalami inflasi), kemudian pada saat yang lain secara bersamaan bisa mengalami penurunan (mengalami deflasi) meskipun sebenarnya "nilai tukarnya" tidak berubah. Oleh karena itu, sebenarnya harga barang dan jasa hanyalah merupakan salah satu dari "nilai tukar" (*value in exchange*) suatu barang dan jasa.

¹¹ Karl Marx, *op.cit*, h. 100

3. Kritik Harga dan Peranannya dalam Produksi, Konsumsi, dan Distribusi

Pendapat ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa hargalah satu-satunya yang mendorong laju produksi suatu negara. Naiknya harga-harga di pasar barang (produk) akan mendorong para produsen untuk menawarkan lebih banyak produknya. Untuk itu produsen perlu meningkatkan produksinya. Sementara itu produksi tidak dapat ditingkatkan kecuali merekrut tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Di sisi lain para pekerja hanya akan menawarkan lebih banyak jasa tenaga kerjanya jika upah yang mereka dapatkan lebih tinggi. Kondisi ini akan berlaku sebaliknya. Oleh karena itu menurut para ahli ekonomi kapitalis yang mendorong manusia untuk mencurahkan jerih payahnya untuk memproduksi adalah imbalan yang bersifat materi (harga).

Pandangan itu adalah pandangan tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab tidak sedikit usaha yang telah dikeluarkan manusia tidaklah semata-mata untuk mendapatkan imbalan berupa materi (harga). Ada orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya moral (pujian) yang bahkan tidak jarang dia bahkan harus mengeluarkan materi dan tidak mendapatkan materi apa-apa. Misalnya ada seseorang membuat makanan untuk dibagikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma. Ada juga usaha memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual seperti ibadah. Sehingga sering kita temui manusia terkadang mengorbankan sejumlah hartanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual, atau kebutuhan moral yang jumlah lebih besar dari yang dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya.

Karena itu harga bukan satu-satunya yang bisa mendorong laju produksi. Kadangkala produksi dapat ditingkatkan dengan harga, dan kadangkala oleh yang lain. Seringkali kita saksikan seseorang yang bekerja berbulan-bulan hanya untuk mendirikan sebuah masjid tanpa mengharapkan upah sedikitpun. Seringkali juga kita jumpai pengusaha yang memproduksi barang tertentu agar dapat dibagikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang memerlukan. Seringkali juga kita saksikan suatu umat atau bangsa yang bekerja keras membangun benteng persenjataan demi untuk mempertahankan tanah airnya tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dan semua kegiatan dicontohkan di atas tidaklah sama sekali didorong oleh harga. Karena itu menjadikan

harga sebagai satu-satunya faktor yang mendorong laju produksi adalah tidak benar.

Pendapat ahli ekonomi kapitalis yang juga menganggap bahwa hargalah yang menjadi pengatur konsumsi dan distribusi di tengah masyarakat adalah tidak tepat. Jika hanya harga yang mengatur konsumsi, maka siapa saja yang tidak mampu membayar "harga" tertentu berarti tidak dapat mengkonsumsi barang dan jasa atau dengan kata lain dia tidak layak untuk hidup.

Adapun harga sebagai penentu konsumsi dan distribusi sebagai berikut: Menurut mereka jumlah barang yang terdistribusi ke konsumen menunjukkan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Padahal faktanya jumlah yang terdistribusi itu belum tentu menunjukkan jumlah kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Misalnya, kebutuhan sebenarnya yang layak sebuah keluarga terhadap beras 60 kg/ bulan, tetapi karena harganya mahal sehingga tidak mampu membeli sebanyak itu, mereka hanya mengkonsumsi sebanyak 45 kg/ bulan. Artinya, jumlah yang terdistribusi ke keluarga itu hanya 45 kg padahal kebutuhan yang sebenarnya 60 kg. Jadi harga itulah yang menyebabkan berkurangnya kebutuhan normal/ layak. Konsumen yang kurang mampu akan tetap berada pada ketidakmampuannya kecuali kalau harga itu turun atau mereka harus mencari pendapatan yang lebih besar.

Konsep seperti ini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan segolongan orang yang tidak mampu mengkonsumsi jumlah barang yang dibutuhkan, terlebih lagi jika kebutuhan tersebut adalah kebutuhan primernya. Ini lebih diperparah jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul. Pada akhirnya jumlah anggota masyarakat yang kekurangan (miskin) akan semakin besar seiring berkembangnya kebutuhan mereka.

Di samping itu dengan menjadikan harga sebagai satu-satunya faktor yang berperan, dalam konsumsi dan distribusi, telah mengakibatkan hanya orang-orang yang memiliki harta untuk membayar harga barang dan jasa yang layak dan mampu hidup.¹² Dan ini tentu saja mengabaikan orang-orang yang lemah, cacat, jompo dan orang-orang yang tidak mampu bekerja. Atau dengan kata lain

¹² Mahmud al-Khalidi, *Op. Cit.*, h. 103-110

hanya orang-orang yang mampu membayar harga barang dan jasa sajalah yang layak hidup sedangkan yang lainnya tidak layak hidup.

PENUTUP

Inilah gambaran tentang sistem ekonomi Sosialis dan Kapitalis, yang bertolak belakang dengan fakta.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Sosialis dan kapitalis dibangun di atas landasan yang keliru dan rusak. Akibatnya penerapan sistem ekonomi Sosialis dan kapitalis dalam kehidupan pun menghasilkan berbagai krisis dan kerusakan di muka bumi. *Wallah a'lam bishawab.*

DAFTAR BACAAN

- Al-Maliki, 'Abdurrahman. 1963. *as-Siyasah al-Iqtisadiyyah al-Muthla*. t.p.
- Al-Khalidi, Mahmud. 1984. *Susiyulujiyah al-Iqtisad fi al-Islam*. Lubnan: Muassasah ar-Risalah.
- _____ 1984. *al-Islam wa ar-Ra'sumaliyyah*. Lubnan: Muassasah ar-Risalah.
- Az-Zayn, Samih 'Atif. 1982. *al-Islam wa Idiyulujiyyat al-Insan*. Dar al-Kutub al-Lubnani, Beirut, cet. III.
- Beaud, Michael. 1995. *Economic Thought Since Keynes*. London: Edward Elgar Publishing. Limited.
- Bernstein, Eduard, 1963. *Evolutionary Socialism*. New York: Schocken Books.
- Connolly, W.E. 1967. *Political Science and Ideology*. New York: Atherton Press.
- Furnivall, J. S. 1948. *Colonial Policy and Practice*. London: Cambridge University Press.
- Ibrahim, Hafizudin, 2001. *Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis*, t.p.
- Hobson, J.S. 1938. *Imperialism*, London: Allen and Unwin.
- Husain, Zakir. 1967. *Capitalism*, London: Asia Publishing House.

- Isaacs, Alan. 1998. *Oxford Paperback Encyclopaedia*, Oxford University Press.
- K. G. Myrdal. 1960. *Beyond the Welfare State: Economic Planning and its International Implication*, New Haven: Yale University Press.
- K. G. Myrdal. 1968. *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*, 3 vols, New York: Twentieth Century Fund.
- K. G. Myrdal, 1958. *Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology*, edited by Paul Streeten, London: Routledge & Kegan Paul.
- Marx, Karl. 1969. *Naqd al-Iqtisad as-Siyasi*. Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, cet. I.
- Nadel, G. H, Curtis. P. 1964. *Imperialism and Colonialism*, New York: Macmillan
- Poerwadarminta, WJS, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka,
- Rosadi, Reza, 2000. *Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis*, t.p.
- Upshall, Michael. 1989. *The Hutchinson Pocket Encyclopaedia*, Century Hutchinson Group.
- Winks, Robin W. t.t. *The Age of Imperialism*. New York: Columbia University Press.
- Winardi. 1992. *Kamus Ekonomi: Inggris-Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, cet. XII.